BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan adalah hak dari setiap warga negara Indonesia tanpa ada pengecualian. Pendidikan merupakan jembatan agar masyarakat memiliki pandangan hidup yang positif oleh karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada seluruh warganya untuk memperoleh hak pendidikan masing – masing tanpa terkecuali. Pendidikan tersebut juga merupakan hak bagi semua orang yang artinya pendidikan dilaksanakan tidak memandang perbedaan orang baik itu dari sudut pandang agama, ras, suku, fisik maupun bangsa. Dari perihal fisik ini pada kenyataanya tidak semua orang mampu memperoleh pendidikan dengan baik. hal inilah yang dialami oleh anak yang berkebutuhan khusus.

> Jalal & Supriadi (dalam Andriyani, 2017, hlm. 1) mengemukakan bahwa secara umum, pendidikan harus mampu menghasilkan manusia yang sebagai individu dan anggota masyarakat yang sehat dan cerdas dengan: (1) kepribadian kuat, religius dan menjunjung tinggi budaya luhur bangsa, (2)kesadaran demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (3) kesadaran moral hukum yang tinggi, dan (4) kehidupan yang makmur dan sejahtera.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran” berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Terkait dengan Mengingat bahwa sangat pentingnya pendidikan untuk semua orang termasuk Anak berkebutuhan khusus (ABK), ABK adalah anak yang mememiliki karakteristik khusus yang berbeda dari anak- anak pada umumnya. Hak ABK dalam Pendidikan harusnya dapat di penuhi sehubungan dengan kebutuhan yang dibutuhkan layaknya manusia normal pada umumnya tanpa ada diskriminasi.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional, Pasal 3 menegaskan bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa: "Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus". Pasal 32 ayat 1 menyebutkan: "Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa".

Pemerintah berkomitmen untuk melindungi hak setiap anak untuk mendapatkan pelayanan dan mempercepat pencapaian wajib belajar 9 tahun melalui pendidikan inklusi. Direktur Jenderal Pendididikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan Surat Edaran No. 380/ C.C6/MN/2003 Tahun 2003 Perihal Pendidikan Inklusi "Setiap kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusi di sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari : SD, SMP, SMA, SMK." Untuk mempercepat perwujudan pendidikan inklusi di Indonesia maka dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009 mengenai Pendidikan Inklusi.

Dalam Permendiknas tersebut dijelaskan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan anak pada umumnya. Maka sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi memberikan pelayanan khusus bagi siswa dengan segala macam kebutuhannya.

> Karakteristik pendidikan inklusi yang dapat dijadikan dasar layanan pendidikan bagi anak luar biasa. Sapon & Shevin (dalam jauhari, 2017, hlm. 29) menyatakan bahwa, "Pendidikan inklusi sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya."

Pendidikan inklusi merupakan salah satu alternatif pendidikan bagi ABK dalam sekolah umum, karena dianggap sebagai upaya untuk menumbuhkan keterampilan sosial bagi ABK maupun anak normal agar dapat hidup bersama dengan saling memahami dan menerima satu sama lain. Salah satu upaya dalam mengembangkan pendidikan inklusi adalah dengan melengkapi fungsi sekolah sebagai pusat sumber dan layanan. Pendidikan inklusi memiliki beberapa tujuan utama yaitu: 1) memberikan kesempatan kepada semua anak mendapatkan pendidikan yang layak dan mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar, 2) mewujudkan siswa ABK yang mandiri, adaptabel dan bermutu dan 3) meningkatkan mutu pendidikan.

Salah satu sekolah di kabupaten Sijunjung yang menerapkan program pendidikan inklusi yaitu, SMA Negeri 9 Sijunjung yang berlokasi di Jl Tanah Bedantung Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan wawancara dengan wakil kesiswaan diketahui bahwa sekolah SMA Negeri 9 Sijunjung ini mulai menerima peserta didik ABK sejak tahun 2015 namun baru bisa dikatakan pelayanan yang siap utuk sekolah inklusi di tahun 2018 dikarenakan jumlah siswa ABK yang semakin bertambah dan kesiapan dari tenaga pendidik untuk menyikapi siswa ABK.

Orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak terfasilitasi di SLB, menginginkan anaknya bersekolah di sekolah reguler dengan demikian mereka dapat belajar beradaptasi. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya siswa ABK yang bersekolah di sekolah SMA N 9 Sijunjung.

Pada proses penerimaan peserta didik baru di sekolah biasanya melakukan pengamatan terlebih dahulu pada saat peserta didik mendaftar sekolah. Sejauh ini SMA Negeri 9 Sijunjung telah menangani peserta didik yang memiki jenis kebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan berkesulitan belajar. Dalam pelaksaaan pembelajaran di SMA Negeri 9 Sijunjung masih banyak mengalami hambatan hambatan dari aspek internal dan eksternal. Wawancara yang dilakukan dengan guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling di SMA Negeri 9 Sijunjung ditinjau dari aspek internal Peserta didik berkebutuhan khusus tidak konsentrasi dalam belajar dan adanya peserta didik berkebuthan yang lambat dalam

memahami materi pelajaran dan peserta didik berkebutuhan khusus dalam belajar sering keluar masuk kelas, guru mengalami kesulitan dalam mengajar siswa berkebutuhan khusus tersebut karena kurangnya kesiapan guru dalam menyiapkan materi, hal ini dikarenakan guru memiliki banyak tugas yang lain sehingga terkendala waktu sehingga dalam pembelajaran yang kurang persiapan tersebut menyebabkan pembelajaran menjadi kurang menarik dan tujuan pembelajaran tidak tercapai. Guru juga merasa masih perlu mengikuti adanya pelatihan tentang pendidikan inklusi. Selain itu, guru juga merasa kesulitan dalam pengkondisian situasi pembelajaran meskipun siswa reguler sama sekali tidak terganggu dan tidak menyadari dengan adanya perbedaan diantara temannya. Sehingga dalam pembelajaran masih kurang maksimal. Dari aspek eksternal masih minimnya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten terhadap aksesibilitas di sekolah inklusi SMA Negeri 9 Sijunjung.

> Mayya, dkk. (2019, hlm. 110) Kebijakan dari pendidikan inklusi ini telah berlangsung selama lebih dari satu dekade, Namun masih ada beberapa penyelenggaraan yang masih mengalami hambatan- hambatan diantaranya: 1) pemahaman staf sekolah yang keliru mengenai inklusi; 2) sekolah belum melakukan penterjemahan kebijkan kedalam peraturan yang lebih teknis; 3) proses pembelajaran yang tidak fleksibel dan kurikulum yang kaku; 4) masih kurangnya kuantitas dan kualitas guru pembimbing khusus (GPK); 5) masih minimnya pelayanan dan aksesibilitas di sekolah dan 6) masih lemahnya sistem dukungan dari orangtua siswa, masyarakat dan pemerintah.

> Sementara Dika (dalam Junaidi, 2016, hlm. 4) mengungkapkan hambatan-hambatan yang tengah dihadapi dalam pendidikan inklusi sebagai berikut: (1) kurikulum yang tersusun kaku dan kurang tanggap terhadap kebutuhan anak yang berbeda dan negara mendorong kebutuhan pendidikan dasar tanpa memperhatikan issue pendidikan anakberkebutuhan khusus; (2) kebijakan yang kurang mendukung dengan tidak memisahkan komponen pendidikan khusus ini yang seharusnya tidak lagi dibedakan, dalam arti bahwa pendidikan inklusi bukan lagi tambahan tetapi masuk dalam pengaturan umum; (3) kurangnya ketersediaan anggaran; (4) dukungan sumber daya manusia yang terbatas, serta; (5) pandangan masyarakat terhadap pendidikan yang kurang dipahami secara utuh.

Berdasarkan uraian diatas masih terdapat gap (perbedaan) antara tujuan kebijakan dan kondisi ideal dengan realisasi implementasi di lapangan dan kurang optimal nya pendidilan inklusi yang terlaksana di SMA Negeri 9 Sijunjung. Hal ini

menjadi menarik untuk diteliti, sebagai upaya dalam rangka mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang memberi dampak terhadap kinerja penyelenggaran pendidikan inklusi, untuk kemudian mencari solusi dan strategi pemecahan masalahnya guna mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Peneliti mengambil judul skripsi "Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di SMA Negeri 9 Sijunjung di Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat".

1.2. Fokus Masalah Penelitian

1.2.1. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini pada Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di SMA Negeri 9 Sijunjung di Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat**.**

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdaskan focus masalah diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimana profil anak berkebutuhan khusus di SMA Negeri 9 Sijunjung?
b. Bagaimana penyelenggaraan pendidikan inklusi SMA Negeri 9 Sijunjung?
c. Bagaimana program peningkatan sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusi SMA Negeri 9 Sijunjung?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusi di SMA Negeri 9 Sijunjung di Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui gambaran tentang profil anak berkebutuhan khusus di SMA Negeri 9 Sijunjung terkait dengan jumlah dan jenis anak

berkebutuhan khusus, permasalahan yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus.

b. Untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan inklusi di SMA Negeri 9 Sijunjung terkait mengidentfikasi anak berkebutuhan khusus, pelaksanaan pembelajaran disekolah inklusi, manajemen sekolah inklusi.
c. Untuk mengetahui tujuan, program, dan upaya peningkatan sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusi SMA Negeri 9 Sijunjung.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis (keilmuan)

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, mengenai pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusi.

2. Praktis

a. Bagi sekolah hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan menindak lanjuti permasalahan yang terjadi dan menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang tepat dari tiap hambatan yang dialami guru kelas inklusi.
b. Bagi guru untuk membantu meningkatkan pemahaman guru dalam pelaksanaan pembeljaran siswa ABK di sekolah inklusi.
c. Bagi peneliti lain hasil peneliti ini dapat dijadikan refensi bagi peneliti lain, sebelum benar- benar turun ke lansung sebagai guru dalam merancang pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan pendidikan inklusi.

1.4. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi membahas mengenai isi masing-masing bagian yang terdapat pada skripsi mulai dari bab I hingga Bab V. Pada bab I pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dan struktur organisasi skripsi. Pada bab II kajian teori membahas mengenai teori yang sejalan dengan penelitian yaitu konsep dasar ADHP, aksesibilitas, dan *guiding block*. Selanjutnya bab III metode penelitian membahas mengenai 7 poin penting yaitu desain penelitian, tempat penelitian, subjek penelitian, instrumen penelitian, teknik

pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data. Berikutnya bab IV Temuan dan pembahasan ini berisikan hasil penelitian yang dilakukan serta pembahasan lebih lanjut terhadap informasi yang ditemukan. Terakhir terdapat bab V simpulan dan rekomendasi yang berisikan poin-poin penting terhadap penelitian mulai dari awal hingga akhir, dan memberikan rekomendasi yang bersifat membangun untuk masa yang akan datang.